

**Bantuan Demokrasi dalam Perspektif “Jepang Baru”: Suatu Analisis
terhadap Diplomasi Demokrasi Jepang**

by

Ishaq Rahman*

Abstract

As a country with a stable capacity in economic, Japan's role in international development is shown by becoming a major donor countries through the mechanism of Official Development Assistance (ODA). However, various dynamics of international relations post-World War II had pushed Japan to engage further, beyond the limits which set out in constitution 1947 about military and defense. This article analyzes how Japan put diplomacy of democracy as a vision to actualize the "New Japan", which is a state construction with total involvement in the international world.

Keywords: Japan, Diplomacy, Democracy Assistance

Pendahuluan

Kaisar Jepang, Hirohito, menyampaikan sambutan awal tahun 2015 dengan mengingatkan beberapa hal, antara lain tentang momentum perang dunia kedua yang tahun ini memasuki peringatan ke-70. Kaisar mengajak semua pihak agar belajar dari rasa sakit dan duka yang ditinggalkan perang, untuk merumuskan arah dan masa depan negeri (Japan Times 2015). Pada hari yang sama, seolah menerjemahkan pemikiran Kaisar, Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan postur negara seperti apa yang menjadi tujuan. “Jepang telah belajar dari penderitaan paska perang dunia, menjadi negara bebas dan demokratis yang konsisten tampil sebagai bangsa cinta damai selama 70 tahun terakhir ini, dan menjadi kontributor utama perdamaian dan kesejahteraan global”, kata Abe. Sekarang, telah tiba waktunya bagi kita untuk mengirimkan pesan kepada dunia, kita sedang mempersiapkan bangunan “Jepang Baru” (Abe 2015).

* Dosen Tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin. Kini sedang menempuh program doktoral pada Graduate School of Global Studies, Doshisha University, Kyoto

Kedua pidato ini mengandung pesan yang jelas. Jepang mengalami kehancuran luar biasa pada Perang Dunia II, dua kota utama (Hiroshima dan Nagasaki) di hancurkan oleh bom atom, serta sebagian besar kota-kota utama hancur lebur. Ibukota Tokyo, misalnya, menjadi sasaran bombarbir pada tanggal 9-10 Maret 1945 sebagai bagian dari serangan tentara sekutu yang disebut *the Operation Meetinghouse*, dimana hingga kini tercatat sebagai serangan udara tunggal paling menghancurkan sepanjang sejarah (Long 2011). Berangkat dari puing-puing kehancuran paska Perang Dunia II tersebut, Jepang membenahi diri dan berusaha sekuat daya untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Sejarah mencatat, Jepang adalah kekaisaran utuh yang homogen dan telah bertahan selama lebih dari 2500 tahun.

Selama periode 70 tahun paska Perang Dunia II, banyak hal telah dilewati oleh Jepang, baik sebagai suatu bangsa maupun sebagai negara. Sebagaimana refleksi yang diungkapkan dalam pesan awal tahun oleh Kaisar Hirohito tersebut, Jepang pernah mengalami kehancuran, kemiskinan luar biasa, masalah nasionalisme agresif, bencana alam, konflik dengan negara tetangga, hingga akhirnya menikmati posisi sebagai negara maju, pertumbuhan ekonomi tinggi, teknologi canggih, bahkan menjadi negara donor terbesar di dunia. Sekilas, nampak bahwa gagasan Jepang Baru, sebagaimana diungkapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, memiliki alasan rasional. Akan tetapi, pada saat bersamaan, entitas-entitas internasional nampaknya masih menyimpan kecurigaan terhadap gagasan ini. Faktor historis, dan juga realitas konstalasi hubungan Jepang dengan berbagai negara di dunia, belum sepenuhnya siap dengan ide tersebut.

Upaya dan semangat (sebagian ahli menyebutnya “etos”) Jepang yang begitu kuat menjadikan proses rekonstruksi paska Perang Dunia II tidak membutuhkan waktu lama, bahkan mencengangkan. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 dalam keadaan hancur lebur Jepang menjadi negara yang hidup dari bantuan internasional. Akan tetapi, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun (yaitu pada tahun 1954) Jepang telah mampu tampil sebagai negara pemberi bantuan internasional ketika bergabung dalam *the Colombo Plan* (Kawasaki 2014). Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, Jepang

berada pada periode pertumbuhan ekonomi sangat cepat, dimana berbagai infrastruktur dibangun bersamaan inovasi besar-besaran dalam teknologi untuk kehidupan. Memasuki dekade 1980-an, Jepang telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil di dunia, menerobos hingga ke dalam perekonomian Amerika (Wile 2013). Pada tahun 1989, Jepang telah mengungguli AS sebagai negara pemberi bantuan internasional terbesar di dunia (Kawasaki 2014).

Salah satu indikasi keinginan Jepang untuk tampil dan berperan lebih besar dalam dunia internasional adalah perubahan mendasar dalam implementasi bantuan luar negeri. Sejak tahun 1954 (ketika pertama kali tampil sebagai negara donor paska Perang Dunia II), Jepang memfokuskan aktivitas bantuan luar negeri pada bidang ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur. Akan tetapi, sejak pertengahan dekade 2000-an, pemerintah Jepang mulai memasuki secara signifikan wilayah yang selama ini diabaikan, yaitu “bantuan demokrasi”. Indikasi keterlibatan Jepang dalam bantuan demokrasi dapat diamati sejak bulan Desember 2005, ketika Menteri Luar Negeri Jepang (ketika itu) Taro Aso menyampaikan pidato berjudul *Asian Strategy As I See It: Japan As the “Thought Leader” of Asia*. Pidato yang mendapat respon akademik dan praksis luas ini kemudian diikuti dengan serangkaian perubahan dalam kebijakan internasional Jepang.

Salah satu alasan mengapa Jepang dapat begitu cepat melakukan rekonstruksi adalah jaminan keamanan AS, sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Keamanan Bersama AS – Jepang yang ditandatangani pada 1951 dan direvisi pada 1960 (Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.). Dengan perjanjian ini, militer AS terus hadir sebagai payung keamanan bagi Jepang, terutama untuk menghadapi setiap ancaman serangan nuklir dari negara-negara di sekitarnya. Setiap serangan terhadap wilayah Jepang dapat diartikan sebagai serangan terhadap Amerika (Packard 2010). Perjanjian keamanan ini telah membalik konstalasi global, dimana AS dan Jepang yang saling berhadap-hadapan pada Perang Dunia II kini tampil sebagai sekutu yang kuat, bahkan lebih kuat dari persekutuan AS dengan negara-negara sekutunya pada masa perang. Selain itu,

perjanjian ini juga selalu menjadi variabel penting dalam hubungan bilateral Jepang dengan tetangga-tetangga terdekatnya (yaitu Korea Selatan dan China) yang dipenuhi debat historis pada banyak isu dan seringkali mempengaruhi tensi hubungan hari ini.

Sesuai Konstitusi 1947, Jepang tidak diperkenankan lagi menggunakan militer sebagai instrumen untuk menyelesaikan setiap isu internasional. Dengan kata lain, negara ini tidak diperkenankan memiliki angkatan bersenjata dengan kemampuan menyerang negara lain. Fenomena yang dikenal sebagai *pasifisme* (berasal dari bahasa Latin *pacem* yang berarti perdamaian) selalu menjadi perdebatan domestik dan juga internasional. Sebagaimana diketahui, pasal 9 Konstitusi 1947, dengan tegas membatasi Jepang dalam hal pengembangan militer, kecuali untuk membela diri jika ada serangan luar.¹ Sehingga, Jepang mau tidak mau harus mengadopsi prinsip-prinsip pasifisme pada setiap kebijakan luar negerinya. Negara ini tidak diijinkan menggunakan angkatan bersenjata sebagai instrumen menyelesaikan persoalan internasional.

Artikel ini bermaksud mengidentifikasi bantuan demokrasi dalam konteks gagasan Jepang untuk berperan lebih besar dalam hubungan internasional dewasa ini, terutama dengan menganalisa kecenderungan-kecenderungan kebijakan politik (domestik dan internasional) pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Dengan menganalisis sejarah, visi, dan strategi dalam implementasi bantuan demokrasi, penulis hendak menjelaskan peluang dan kendala yang dihadapi Jepang, khususnya dalam kaitannya dengan respon negara-negara besar di level regional maupun internasional.

Strategi Jepang di Asia

Prinsip pasifisme merupakan dampak langsung dari intervensi Amerika Serikat (AS) yang atas nama sekutu mendarat di Jepang pada bulan September 1945. Kehadiran AS selama sekitar tujuh tahun membawa visi untuk “melucuti” karakter agresif yang menurut persepsi Barat merupakan salah satu karakter Jepang. Reformasi total yang dibawa selama masa pendudukan ini melingkupi hampir seluruh bidang kehidupan, termasuk otoritas untuk menulis kembali

hukum, restrukturisasi ekonomi dan sistem politik, bahkan untuk mendefinisikan kembali nilai-nilai budaya Jepang (Gordon 2003, 229). Apa yang dihasilkan dengan pendudukan dan intervensi ini adalah demiliterisasi pada satu sisi, dan demokratisasi pada sisi lain. Jepang mampu mengambil manfaat dari situasi “terlucuti” ini dengan konsisten menjadi bangsa yang damai, tidak terlibat konflik bersenjata secara terbuka dengan negara manapun, sehingga negara ini dapat mengkonsentrasikan restrukturisasi paska perang untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi.

Akan tetapi, fakta bahwa negara ini sedang menghadapi tantangan internasional yang tidak kecil, menyebabkan isu pengembalian hak-hak militer Jepang terus menjadi wacana. Sejak tahun 2010, *Japan Self Defense Force* (JSDF) mulai intensif melakukan latihan militer tahun di wilayah perairan yang berdekatan dengan pulau-pulau yang sedang disengketakan dengan China. Bahkan, pada latihan bersama tahun 2013, Perdana Menteri Shinzo Abe tampil menggunakan atribut militer (CCTV News 2013). Inilah untuk pertama kalinya seorang Perdana Menteri Jepang tampil di muka umum dengan atribut seperti ini, yang oleh sebagian besar pengamat diartikan sebagai ungkapan keseriusan pemerintah Jepang untuk mulai mempersenjatai diri dan mengembangkan militer.

Gagasan Jepang Baru (*the new Japan*) sebenarnya mulai muncul pada dekade 1990-an, seiring kebangkitan ekonomi Jepang setelah berhasil mengatasi berbagai persoalan ekonomi domestik paska kehancuran Perang Dunia II. Pada tahun 1993, seorang tokoh senior dan dihormati dalam politik Jepang, Ichiro Ozawa menulis buku berjudul: *Blueprint for a New Japan (Nihon Kaizou Keikaku)*. Buku ini begitu menarik perhatian Amerika Serikat dan dunia, sehingga mendorong Central Intelligence Agency (CIA) secara khusus menerjemahkannya. Versi bahasa Inggris ini diterbitkan pada tahun 1994 dan menjadi salah satu buku *best seller*. Buku ini merupakan pernyataan dari dalam tubuh politisi Jepang, dimana Ozawa telah dikenal sebagai tokoh dibelakang layar (dia digelari *the Shadow Shogun* atau “*yami shogun*”) dalam banyak keputusan politik Jepang pada masa itu (Harris 2009).

Gagasan paling menarik perhatian di buku ini adalah argumen bahwa Jepang kini telah kembali ke jati dirinya sebagai “*futsuu no kuni*” (negara normal). Ungkapan ini mengindikasikan bahwa Ozawa selama ini menganggap bahwa Jepang berada pada keadaan tidak normal sebagai sebuah negara (Johnson 1994). Meskipun gagasan mengenai “negara normal” ini sebenarnya telah disuarakan sebelumnya oleh beberapa ahli barat beraliran revisionis, namun konteksnya berbeda. Jika para revisionis ini melihat konsep tersebut dalam kerangka kapitalisme Jepang (perspektif ekonomi politik), Ozawa lebih memahaminya sebagai gagasan untuk “mempersenjatai” kembali Jepang, agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB (perspektif politik internasional). Ozawa mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 dengan menambah paragraf ketiga yang memungkinkan penggunaan senjata untuk keperluan perdamaian internasional adalah legal (Johnson 1994). Sayangnya, gagasan ini mendapat kritikan yang tajam bahkan di dalam negeri Jepang sendiri, dimana proposal Ozawa ini dianggap mengkhianati prinsip pasifisme dalam politik luar negeri Jepang.

Namun demikian, kehadiran buku tersebut telah melahirkan kesadaran baru tentang eksistensi Jepang yang semakin berperan di tingkat global. Dalam bidang bantuan luar negeri, misalnya, Jepang berhasil menggeser posisi AS sebagai negara pemberi bantuan luar negeri terbesar dari segi jumlah pada tahun 1989. Capaian ini merupakan momentum penting dalam politik luar negeri Jepang, khususnya dalam kerangka strategi dan capaian *Official Development Assistance* (ODA).

Upaya memformulasi gagasan “Jepang Baru” dalam bentuk kebijakan terstruktur pemerintah Jepang dapat ditelusuri melalui pidato Menteri Luar Negeri (ketika itu) Taro Aso dihadapan The Foreign Correspondents’ Club of Japan pada 7 Desember 2005. Melalui pidato berjudul *Asian Strategy As I See It: Japan as the “Thought Leader” of Asia* tersebut, Aso menawarkan gagasan kepemimpinan Asia dalam format yang jauh lebih lunak dari gagasan yang sama pada masa-masa Perang Dunia. Secara garis besar, Aso mengidentifikasi Jepang dalam tiga perspektif optimistik, yaitu: Jepang sebagai “pemimpin dalam hal

gagasan”, Jepang sebagai stabilisator, dan Jepang sebagai negara yang menghormati bangsa lain sebagai mitra sejajar (Aso, *Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia* 2005).

Sebagai pemimpin gagasan, Jepang adalah negara yang telah melewati hampir seluruh pengalaman hidup berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Jepang mengatasi berbagai masalah dengan “pengalaman langsung”. Sehingga, kini saatnya bagi Jepang untuk membagikan gagasan tersebut kepada negara-negara lain di Asia, melalui pendekatan yang oleh Aso disebut sebagai *trailblazer* (“pembuka jalan”). Berbagai persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa-bangsa di Asia, baik ekonomi maupun politik, telah dihadapi dan berhasil diatasi oleh Jepang pada dekade 1950-an dan 1960-an (Aso, *Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia* 2005).

Sebagai stabilisator, Jepang dewasa ini berada situasi ekonomi dan politik paling stabil di Asia. Meskipun tantangan dan dinamika selalu dihadapi, akan tetapi negara ini telah memiliki mekanisme permanen dan siap pakai untuk menjawab berbagai persoalan. Hal itulah yang menyebabkan Jepang dapat berkontribusi pada kestabilan kawasan secara umum. Sebagai negara demokrasi tertua di Asia, sekaligus juga merupakan negara dengan sistem ekonomi pasar tertua di Asia, Jepang kini telah bertransformasi sebagai stabilisator internal kawasan. Dalam konteks itu, adalah penting bagi Jepang untuk membangun ikatan-ikatan permanen dengan pilar-pilar di kawasan, seperti ASEAN (Aso, *Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia* 2005).

Selanjutnya, sebagai mitra sejajar bagi negara-negara lain di Asia, Jepang telah membuktikan mampu menjalin hubungan tanpa mengenal strata negara kuat-negara lemah, negara kaya-negara miskin, atau “negara kanan” - “negara kiri”. Sebagai contoh, kata Aso, ketika peringatan 10 tahun ASEAN pada tahun 1977, Perdana Menteri Takeo Fukuda mengajak untuk membangun hubungan “dari hati ke hati” sebagai basis hubungan Jepang - ASEAN.² Jepang juga menyadari sepenuhnya bahwa masa lalu negara itu yang banyak membawa penderitaan bagi penduduk di Asia, khususnya Korea dan China, dimana

kesadaran tersebut telah mendorong Jepang untuk mengedepankan kehidupan bertetangga baik dan sejajar, bukan hanya terhadap kedua negara tetapi juga kepada seluruh warga Asia (Aso, *Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia* 2005).

Pidato Taro Aso tersebut menjadi bahan diskusi yang hangat. Sebagian kalangan menilai bahwa ide Jepang untuk kembali tampil sebagai pemimpin Asia masih penuh kecurigaan, mengingat jejak sejarah yang ditinggalkan selama Perang Dunia II. Ketika masa-masa tersebut, Jepang melancarkan kampanye okupasi di Asia Timur dengan prinsip yang sangat populer di Indonesia dengan sebutan 3-A, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia.

Meskipun Aso menyinggung tentang keunggulan Jepang sebagai negara demokrasi tertua³namun hal itu belum tercermin dalam gagasan politik luar negeri secara aktual. Selama puluhan sejak akhir Perang Dunia II, partisipasi Jepang dalam politik internasional, baik pada level global maupun regional difokuskan pada upaya membangun hubungan baik, mendominasi pemberian bantuan pembangunan untuk ekonomi, infrastruktur, dan bantuan teknis. Akan tetapi, Jepang mengabaikan promosi isu-isu non tradisional yang semakin hari semakin diterima sebagai nilai global, seperti human security, promosi hak asasi manusia, dan promosi demokrasi.

Pilar Baru Kebijakan Luar Negeri Jepang

Ketika Shinzo Abe menjabat Perdana Menteri Jepang pertama kali pada 26 September 2006, Taro Aso dipercayakan untuk terus menjadi Menteri Luar Negeri, yang telah ia jabat sejak tahun 2005 dibawah Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Dengan demikian, Aso dapat meneruskan gagasan kepemimpinan Jepang dan ide-ide Jepang baru yang telah ia lontarkan.

Pada bulan Nopember 2006, Aso menyampaikan pidato berjudul *Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons* pada Seminar yang diselenggarakan oleh *the Japan Institute of International Affairs* (JIIA). Pidato ini mendapatkan perhatian lebih luas lagi, bahkan Kementerian Luar Negeri

Jepang mengadakan simposium khusus dengan judul yang sama pada bulan Februari 2007. Selain itu, beberapa ahli juga secara khusus mengulas gagasan Aso tentang “lingkar kebebasan dan kesejahteraan”⁴ ini, misalnya paper yang ditulis oleh Tomohiko Taniguchi (2010), artikel yang ditulis oleh Yuichi Hosoya pada jurnal *Asia Pacific Review* (Taylor and Francis, 2011), atau bab yang ditulis oleh Yuasa Takeshi dalam buku *Japan's Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead* (Christopher Len, Uyama Tomohiko, dan Hirose Tetsuya, 2008). Gagasan ini menjadi menarik bukan saja karena ia dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri, akan tetapi juga karena pemerintah Jepang betul-betul mengadopsi gagasan tersebut dalam kebijakan luar negeri. Laporan tahunan politik luar negeri Jepang (*Diplomatic Bluebook*) tahun 2007 bahkan diberi judul “*A New Pillar for Japanese Diplomacy: Creating an Arc of Freedom and Prosperity*”.

Arc of Freedom and Prosperity merupakan pilar baru diplomasi Jepang yang membujur dari kawasan Asia hingga Eropa. Secara fundamental, basis kebijakan luar negeri Jepang adalah selalu dalam kerangka memperkuat aliansi Jepang – AS. Karakteristik dari pilar baru ini adalah:

First of all, there is “value oriented diplomacy,” which involves placing emphasis on the “universal values” such as democracy, freedom, human rights, the rule of law, and the market economy as we advance our diplomatic endeavors. ... And second, there are the successfully budding democracies that line the outer rim of the Eurasian continent, forming an arc. Here Japan wants to design an “arc of freedom and prosperity”. Indeed, I believe that we must create just such an arc (Aso, Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons 2006).

Inilah pertama kalinya pemimpin Jepang pada masa paska perang dunia yang dengan terbuka menegaskan kemampuan negara ini sebagai *torchbearer* (pembawa obor, pembuka jalan) nilai-nilai universal seperti demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan rule of law (Taniguchi 2010). Perubahan ini tentu saja mendatangkan sejumlah kritik, baik internal maupun eksternal, terutama dalam kerangka hubungan aliansi Jepang dan AS. Akan tetapi, Aso menegaskan bahwa dalam konteks kebebasan dan demokrasi, tidak

ada satupun negara di dunia ini yang dapat mengklaim diri paling sempurna. Bahkan aktor-aktor yang gencar mempromosikan demokrasi sekalipun tidaklah berarti telah mempraktekkan nilai-nilai ini secara maksimal. Akan tetapi, jika kita telaah kembali sejarah, Jepang sesungguhnya adalah “pemain veteran” dalam isu ini (Aso, *Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons* 2006).

Diplomasi berorientasi nilai global merupakan pendekatan yang sebelumnya diabaikan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Meskipun memiliki potensi untuk menjadi promotor demokrasi global (baik karena pengalaman sebagai negara berhasil bertransisi mengadopsi demokrasi liberal secara damai dan stabil, maupun karena kemampuan ekonomi yang dimiliki), Jepang selama puluhan tahun cenderung menghindari isu tersebut. Alasan utamanya adalah Jepang cenderung memilih untuk tidak menyentuh isu-isu yang sensitif bagi negara-negara mitranya. Sebagaimana diketahui, isu demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, atau kebebasan masih menjadi isu sensitif bagi banyak negara yang berada di bawah tekanan otoritarianisme sepanjang masa perang dingin, terutama negara-negara di Asia Timur dan Tenggara. Namun, seiring berakhirnya perang dingin pada awal dekade 1990-an dan seiring dengan gelombang demokratisasi yang menerpa hingga ke kawasan Asia Timur dan Tenggara, perlahan-lahan negara-negara di kawasan ini juga mulai mengadopsi gagasan universal tersebut dan makin terbuka terhadap isu-isu yang sebelumnya dianggap terbatas. Aso menegaskan pandangan ini mengatakan:

*If I were to put into a single phrase, I would say that many countries are now walking down the road to “peace and happiness through economic prosperity and democracy”. And, as I am fond of saying, this is exactly the road that Japan herself walked down after the war, and the road down which the countries of ASEAN are currently making their way (Aso, *Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons* 2006).*

Lingkaran kebebasan dan kesejahteraan dalam konteks ini adalah bangunan interaksi dengan negara-negara yang terletak di wilayah Eropa-Asia (meliputi Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan dan Tengah, membentang ke

selatan hingga di Asia Timur, Asia Tenggara, mencapai Australia dan Selandia Baru (Taniguchi 2010). Dalam rangka mewujudkan “bangunan” baru dengan pilar tersebut, Aso menegaskan bahwa negara ini akan terus bekerja bersama-sama Amerika Serikat untuk mewujudkan lingkaran tersebut, bersama-sama dengan Australia, India, Uni Eropa dan anggota-anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk memperluas dan mengeksiskan “*the zone of rule of law dan good governance*” ini (Kliman dan Twining 2014).

Secara konkrit, gagasan pilar baru yang disebut “*the Arc of Freedom and Prosperity*” menegaskan bahwa Jepang akan bertindak dalam kemitraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menyebarkan nilai-nilai fundamental global yang telah dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai Jepang, yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki karakteristik kebebasan dan kesejahteraan. Mekanisme mencapainya adalah melalui kerja sama pada area-area perdagangan dan investasi serta memaksimalkan fungsi bantuan pembangunan Jepang untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup dasar (seperti pendidikan dan layanan kesehatan), mendukung terciptanya *demokrasi yang membumi*, dan mendukung kemajuan infrastruktur dan kerangka hukum. Pilar ini akan menjadi *building block* penting yang akan berkontribusi pada realisasi *human security* yang telah lebih dahulu menjadi fokus Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2007).

Hal menarik dari pilar baru ini adalah munculnya isu *Democratic Three*(Kliman dan Twining 2014) yang terdiri dari Australia, India, dan Korea Selatan. Lagi-lagi, inilah untuk pertama kalinya Jepang mengembangkan hubungan dalam kerangka keamanan diluar aliansi tradisionalnya dengan Washington. Pada saat yang sama, Washington nampaknya memberikan dukungan nyata terhadap ide Jepang memperkuat aliansi demokratis dengan ketiga negara ini. Sebagaimana tertuang dalam deklarasi *the U.S. – Japan “Two-plus-Two”* antara menteri pertahanan kedua negara pada Oktober 2010 yang mengakui pentingnya kerjasama pertahanan dan keamanan antara aliansi dan mitra di kawasan, yang secara khusus memberi atensi terhadap keberhasilan dialog trilateral bersama Australia dan Korea Selatan (U.S. Department of State

2010).

Analisis: Diplomasi Demokrasi dan Jepang Baru

Dalam politik domestik, demokrasi biasanya dilihat sebagai proses politik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan, baik vertikal (antara aktor-aktor demokrasi) maupun horisontal (antara negara dan masyarakat). Sementara dalam politik internasional, demokrasi merupakan isu yang lebih berkonteks keamanan (*security*), sehingga setiap dimensi hubungan bilateral dalam kerangka demokrasi (baik dalam konteks promosi maupun proteksi demokrasi) dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isu keamanan tradisional. Hal ini dapat ditelusuri dalam sejarah bantuan demokrasi yang dimulai oleh Amerika Serikat paska perang dunia dalam skema Marshall Plan (Rahman 2011).

Arsitektur dari lingkaran ini dapat ditarik dari timur yang meliputi ASEAN, dimana Jepang akan memberi perhatian khusus pada situasi demokrasi di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Ke arah utara, Jepang akan secara aktif mendukung demokratisasi dan pemeliharaan perdamaian di Nepal dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Di Eropa, demokratisasi telah berlangsung di Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Bulgaria dan Rumania sejak dekade 1990-an. Jepang secara aktif mendukung proses di negara-negara Baltik, terutama kelompok GUAM (Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova), serta negara-negara yang tergabung dalam *the Community of Democratic Choice (CDC)*.⁵

Di Asia Tengah, negara-negara bekas Uni Sovyet telah menunjukkan kemajuan gradual dalam proses demokratisasi dan implementasi ekonomi pasar, yaitu: Kazakhstan, Usbekistan, Kyrgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Melalui kerangka kerjasama *the Central Asia plus Japan Dialogue*, Jepang memberi kontribusi untuk terciptanya kerjasama regional dengan kemungkinan melibatkan juga Afghanistan dan Pakistan (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2007).

Paparan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa apa yang dimaksud dengan pilar baru dalam diplomasi Jepang adalah adopsi nilai-nilai universal terutama demokrasi (dan demokratisasi), hak asasi manusia, penegakan hukum,

sebagai pelengkap pendekatan tradisional kebijakan luar negeri Jepang. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menegakkan pilar tersebut adalah dengan memberi alokasi lebih besar dalam skema ODA Jepang, dengan memasukan pula bantuan demokrasi sebagai pilar penting.

Dalam menganalisa bantuan luar negeri Jepang sebagai instrumen diplomasi baru Jepang, perlu kiranya dipahami bahwa ODA Jepang dilaksanakan dengan tiga tipe utama, yaitu *melalui kerjasama teknis, bantuan hibah dan pinjaman* (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2014). Analisa yang dilakukan oleh Sato dan Asano terhadap ketiga variabel bantuan luar negeri Jepang dengan membandingkan variabel independen menunjukkan bahwa dari perspektif realis, terhadap hubungan positif antara tingginya ODA Jepang dan (1) negara-negara penerima yang berbatasan langsung dengan China, (2) negara-negara tersebut secara geografis terletak pada jalur laut yang strategis, (3) memiliki hubungan militer khusus dengan aliansi utama Jepang – AS, dan memiliki kandungan mineral terutama minyak bumi yang diekspor ke Jepang (Sato dan Asano 2008). Meskipun demikian, untuk faktor keempat ini nampaknya merupakan implikasi perspektif realis dan merkantilisme, mengingat bahwa data pada periode 2002 – 2004 tidak mendukung penggunaan strategis bantuan Jepang bagi pengamanan sumber bahan baku mineral dan minyak bumi.

Sementara itu, dari perspektif merkantilisme tampak bahwa Jepang menempatkan kepentingan ekonomi sendiri dalam memutuskan bantuan luar negerinya. Pada saat Jepang secara konsisten banyak memberikan bantuan kerjasama teknis kepada negara-negara yang merupakan importir utama berbagai jenis komoditas bagi Jepang, pola ini nampaknya tidak konsisten untuk variabel pinjaman. Selama dekade 1980-an, berkembang asumsi bahwa bantuan luar negeri Jepang telah digunakan sebagai instrumen untuk mengamankan hubungan ekonomi dan perdagangan kepada mitra-mitra dagang Jepang. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada asumsi ini nampaknya hanya konsisten pada mekanisme bantuan kerjasama teknis dan tidak terlihat konsisten pada instrumen pinjaman (Sato dan Asano 2008).

Di sini tampak bahwa perspektif merkantilisme nampaknya cukup dapat

menjelaskan fenomena diplomasi Jepang melalui pengalokasian bantuan luar negeri pada dekade 1980-an hingga 2000-an. Akan tetapi, seiring dengan perubahan pada pendekatan diplomasi dengan adopsi pilar-pilar baru tersebut, besar kemungkinan akan terjadi pergeseran teoritis ketika memahami fenomena bantuan luar negeri Jepang. Hal ini merupakan ujian bagi perspektif realis, sekaligus juga merupakan agenda teoritis yang bisa menjadi analisis bagi penstudi hubungan internasional Jepang.

Dalam perspektif realis, konsep *power* (kekuatan/kekuasaan) cenderung dominan, dimana aktor-aktor dalam interaksi antarnegara berorientasi memperoleh, mempertahankan, atau mengelola kekuasaan. Baik interaksi itu dalam kerangka bilateral maupun multilateral (baik dengan bergabung pada suatu aliansi atau menjadi bagian dari suatu organisasi internasional fungsional), instrumen *power* tradisional adalah militer. Adagium *pacta sunt servanda* (jika ingin damai maka bersiaplah untuk perang) menjadi landasan dalam pengembangan militer setiap negara, dimana kapasitas dan kapabilitas militer mungkin saja tidak akan digunakan untuk menyerang negara lain akan tetapi berfungsi sebagai instrumen menangkal serangan (*deterrence*). Sehingga, keunggulan Jepang dalam hubungan bilateral dan multilateral melalui penggunaan instrumen bantuan luar negeri membutuhkan dukungan kapasitas penangkalan yang memadai. Selama ini, kapasitas penangkalan tersebut disediakan dalam aliansi strategis Jepang – AS, yang secara nyata ditunjukkan dengan penyediaan wilayah Jepang untuk pangkalan militer AS di Okinawa, Jepang bagian selatan.

Banyak orang Jepang cenderung mengabaikan fakta bahwa pada masa paska perang, Jepang tidak lagi perlu mengkhawatirkan kemungkinan AS akan menjadi musuh. Hal ini berbeda dengan situasi pada masa modernisasi Jepang fase pertama (periode 1868 hingga 1945), dimana modernisasi Jepang ketika berorientasi politik internasional untuk mengimbangi kekuatan militer negara-negara yang berpotensi mengagresi Jepang (Kawashima 2003, 26). Elemen krusial dari Perjanjian Pertahanan Jepang – AS tahun 1951 ini adalah preferensi yang diberikan kepada AS untuk mempertahankan pangkalan militer di Jepang,

dimana ketika perjanjian ini berlaku efektif pada 1952, terdapat 110.000 personil tentara AS bermarkas di pangkalan. Bagi kalangan oposisi dalam politik Jepang, perjanjian ini merupakan bentuk “pelegalan terhadap pendudukan AS terhadap Jepang”. Akan tetapi, mayoritas sejarawan menerima bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Shigeru Yoshida ini lebih dapat dimaknai sebagai kartu untuk mencegah AS terus-menerus mencurigai bangkitnya kembali militerisme Jepang (Kawashima 2003, 26). Apalagi, artikel 1 perjanjian ini menegaskan bahwa:

With the entry into force of the Treaty, Japan permits the right to deploy the Army, the Navy, and the Air Force of the United States within and in the vicinity of Japan and the United States accepts this right. . . . This Force may be used to contribute to the international peace and security in the Far East, and . . . to contribute to the security of Japan against armed attack from outside (Yale Law School n.d.)

Ketika revisi terhadap perjanjian ini diadopsi pada tahun 1960 oleh Perdana Menteri Shinsuke Kishi (dengan nama: *Treaty of Security and Mutual Cooperation between Japan and the United States of America*) pernyataan tentang perlindungan AS terhadap Jepang tetap dipertahankan, akan tetapi provisi terhadap eksistensi pangkalan militer AS perlu dikonsultasikan dengan maksud untuk menghindari penggunaan pangkalan yang tanpa kontrol (Kawashima 2003, 26).

Dinamika keamanan regional dan internasional dewasa ini semakin terdiferensiasi dan meluas. Ancaman-ancaman terhadap kedaulatan juga semakin kompleks, dimana jenis-jenis ancaman baru mulai bermunculan dan menjadi dominan. Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe yang beraliran nasionalistik telah sejak lama mempromosikan isu mengenai perlunya Jepang tetap mempertahankan aliansi strategisnya dengan AS, namun juga diberikan kewenangan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya di luar negeri secara mandiri. Ketika memperoleh mandat sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya, Abe berhasil melakukan revolusi moneter yang dipimpin oleh Bank Sentral Jepang. Kemudian, ia juga berhasil mengimplementasikan

paket stimulus ekonomi yang signifikan mencapai US\$ 116 milyar. Nampaknya, Abe sedang bersiap-siap dengan langkah serius untuk menghadapi tantangan taktik “keras” dari China (Mann 2013).

Tentu saja, isu utamanya adalah amandemen pasal 9 Konstitusi 1947. Berbagai persoalan global yang berkaitan dengan kepentingan di Jepang di luar negeri ternyata tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan aliansi keamanan strategis dengan mitra-mitra terdekat. Pada kasus terakhir yang melibatkan pembunuhan terhadap dua warga Jepang, Kenji Goto dan Haruna Yukawa, oleh militan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), pemerintah Jepang gagal total dalam lobby internasional untuk memperoleh dukungan dan langkah nyata dari sekutu-sekutu utama, termasuk AS (CNN 2015). Fenomena tersebut semakin memantik wacana tentang perlunya Jepang segera mempersiapkan diri untuk terlepas dari batasan konstitusional mengenai angkatan bersenjata.

Kesimpulan

Menyambut tujuh puluh tahun berakhirnya Perang Dunia II, berbagai perubahan dalam lingkungan internasional, serta dorongan dinamika politik domestik nampaknya menjadi faktor penting lahirnya gagasan Jepang baru. Konsideran waktu yang panjang telah membuat Jepang banyak belajar dari pengalaman langsung untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Di sisi lain, perubahan pada lingkungan strategis dan hubungan internasional dewasa ini melahirkan isu-isu baru yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan alternatif bagi setiap negara, tidak terkecuali Jepang. Sementara itu, kemunculan politisi-politisi nasional dengan sentimen nasionalisme yang lebih berorientasi global telah berkontribusi pada dorongan untuk perubahan-perubahan lebih jauh dalam kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Jepang.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa masa depan kemajuan ekonomi dan peran internasional sebagai promotor pembangunan global tidak dapat lagi hanya semata-mata dilandaskan pada pendekatan tradisional yang memisahkan isu ekonomi dari wilayah politik dan keamanan. Secara ekonomi, Jepang memang telah membuktikan kapasitasnya sebagai pengelola hubungan negara

dan swasta pada tingkat domestik, fasilitas kepentingan masyarakat, serta aktor internasional yang dapat mengatasi berbagai tantangan. Akan tetapi, dari politik dan keamanan, Jepang jauh tertinggal dibandingkan aktor-aktor lainnya, sebagai dampak dari batasan yang diwariskan oleh Perang Dunia II. Pada titik inilah persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Jepang, yang juga menjadi perhatian bagi masyarakat regional dan internasional.

Jepang memperkenalkan ide untuk mengembangkan demokrasi sebagai instrumen penting dalam diplomasi internasional pada pertengahan tahun 2000-an. Aplikasinya adalah dengan melakukan reformasi pada strategi bantuan luar negeri (Japanese ODA) dengan mulai meningkatkan jumlah bantuan luar negeri untuk sektor *governance and civil society*, dimana kedua sektor ini dianggap sebagai bagian paling realistis bagi untuk berkontribusi.

Jepang untuk mengadopsi strategi pembangunan aliansi demokratis baru dalam kerangka *the Arc of Freedom and Prosperity*, dimana bangunan kebebasan dan kesejahteraan ini pada dasarnya merupakan kompromi yang menarik antara aspek politik (*freedom*) dan ekonomi (*prosperity*). Secara teoritis, nampaknya akan terjadi pergeseran dari perspektif realis menuju aplikasi mekanisme merkantilis. Tentu saja, dibutuhkan kajian dan penelaahan lebih mendalam untuk menjelaskan argumen-argumen dibalik pergeseran tersebut pada masa mendatang.

Reference

- Abe, Shinzo. "New Year's Reflection by Prime Minister Shinzo Abe." *Prime Minister of Japan and His Cabinet*. 1 Januari 2015. http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201501/newyear.html (diakses Februari 20, 2015).
- Aso, Taro. "Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons." *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. 30 November 2006. <http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html> (diakses Februari 25, 2015).
- . "Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia." *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. 7 Desember 2005. <http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0512.html> (diakses Februari 23, 2015).
- CCTV News. *Japan's ambition to become a military superpower*. 13 Juli 2013. <http://english.cntv.cn/program/newshour/20130713/102142.shtml> (diakses Februari 21, 2015).
- CNN. "Japan: "We will never, never forgive ISIS for apparent beheading"." *CNN Online*. 3 Februari 2015. <http://edition.cnn.com/2015/02/01/middleeast/isis-japan-jordan-hostages/> (diakses Februari 26, 2015).
- Gordon, Andrew. *A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Harris, Tobias. "Japan's New Shadow Shogun." *Foreign Policy*. 27 Agustus 2009. <http://foreignpolicy.com/2009/08/27/japans-new-shadow-shogun/> (diakses Februari 20, 2015).
- Japan Times. *Emperor asks nation to learn from WWII as it looks to future*. 1 Januari 2015. <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/01/national/emperor-asks-nation-learn-history-new-year-statement/> (diakses Februari 21, 2015).
- Johnson, Chalmers. "Book Review: Blueprint of a New Japan, The Rethinking of a Nation. By Ichiro Ozawa." *Momumenta Nipponica* (Sophia University) 49, no. 3 (1994): 379-381.
- Kawasaki, Tami. "Sixty Years of Japanese ODA." *Highlight Japan*, Agustus 2014: 6.
- Kawashima, Yutaka. *Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century*. Washington, DC.: Brookings Institution Press, 2003.

- Kliman, Daniel M., dan Daniel Twining. *Japan's Democracy Diplomacy*. Asian Paper Series July 2014, Washington DC: The German Marshall Fund of the United States, 2014.
- Long, Tony. "March 9, 1945: Burning the Heart Out of the Enemy." *WIRED Magazine*. 9 Maret 2011. <http://www.wired.com/2011/03/0309incendiary-bombs-kill-100000-tokyo/> (diakses Februari 20, 2015).
- Mann, Shannon. "Can Shinzo Abe Make Japan a Super Power Again?" *Policy.Mic*. 06 Agustus 2013. <http://mic.com/articles/58137/can-shinzo-abe-make-japan-a-superpower-again> (diakses Februari 20, 2015).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Diplomatic Bluebook 2007: Arc of Freedom and Prosperity, Japan's Expanding Diplomatic Horizons*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007.
- . "Japan - U.S. Security Treaty." *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. n.d. <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html> (diakses Februari 23, 2015).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Japan's International Cooperation*. Japan Official Development Assistance White Paper 2013, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014.
- Packard, George R. "The United States - Japan Security Treaty at 50: Still a Grand Bargain?" *Foreign Policy*. March/April 2010. <http://www.foreignaffairs.com/articles/66150/george-r-packard/the-united-states-japan-security-treaty-at-50> (diakses Februari 21, 2015).
- Rahman, Ishaq. *Bantuan Demokrasi Amerika Serikat di Indonesia: Studi Tentang Program Demokrasi dan Desentralisasi USAID di Indonesia, 2004 - 2009*. Thesis Master, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Sato, Yoichiro, dan Masahiko Asano. "Humanitarian and Democratic Norms in Japan's ODA Distribution." Dalam *Norms, Interest, and Power in Japanese Foreign Policy*, oleh Yoichiro Sato, & Keiko Hirata, 124. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Taniguchi, Tomohiko. *Beyond "the Arc of Freedom and Prosperity": Debating Universal Values in Japanese Grand Strategy*. Asia Paper Series 2010, Washington, DC: The German Marshall Fund of the United States, 2010.
- U.S. Department of State. "Joint Statement of the Security Consultative Committee: Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities." *U.S. Department of State*. 3 October 2010. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215070.htm> (diakses Februari 25, 2015).

Wile, Rob. "The True Story Of The 1980s, When Everyone Was Convinced Japan Would Buy America." *Business Insider*. 18 Januari 2013. <http://www.businessinsider.com/japans-eighties-america-buying-spree-2013-1?op=1> (diakses Februari 21, 2015).

Yale Law School. "Security Treaty Between the United States and Japan, September 8, 1951." *The Avalon Project*. n.d. http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp (diakses Februari 25, 2015).

Catatan Kaki

¹ Isi lengkap Konstitusi Jepang (English version) dapat diakses pada website *Prime Minister of Japan and His Cabinet*, di alamat: http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

²Pidato Perdana Menteri Fukuda pada 1977 di Manila dikenal sebagai "Fukuda Doctrine" yang menjadi dasar hubungan Jepang - ASEAN. Doktrin Fukuda secara garis besar menyebutkan bahwa: (1) Jepang akan berkomitmen terhadap perdamaian dan tidak akan menjadi negara militer; (2) Jepang akan mengembangkan hubungan saling membutuhkan dengan negara-negara Asia Tenggara pada berbagai bidang; (3) Jepang akan bekerja sama dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam konteks kemitraan sejajar.

³Klaim Jepang sebagai negara demokrasi tertua di Asia ini mungkin saja menimbulkan perdebatan, mengingat India juga seringkali mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi tertua di Asia.

⁴Judul asli pidato Taro Aso dalam bahasa Jepang adalah 「自由と繁栄の弧」 (jiyuu to hannei no ko) yang dalam bahasa Inggris berarti: "The Arc of Freedom and Prosperity". "Arc" berarti "busur" atau "bentuk melengkung" atau "lengkungan". Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah "lingkaran", meskipun sebenarnya yang dimaksud oleh Aso adalah bentuk setengah lingkaran seperti bentuk busur.

⁵The Community of Democratic Choice (CDC) adalah organisasi antarpemerintah yang berdiri pada 2 Desember 2005, dengan visi utama mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan *rule of law* di kawasan Baltik. CDC beranggotakan: Estonia, Georgia, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Rumania, Slovenia, dan Ukraina. Beberapa negara lain yang berpartisipasi sebagai peninjau adalah: Azerbaijan, Bulgaria, Republik Chechnya, Hungaria, Polandia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga hadir sebagai peninjau.